

---

## ANALISIS HUBUNGAN AKREDITASI SEKOLAH LUAR BIASA DENGAN MUTU PENDIDIKAN DI SLB-C NEGERI PEMBINA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Oleh

Muhammad Firdaus Nuzula<sup>1</sup>, Aslamiah<sup>2</sup>, Celia Cinantya<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Lambung Mangkurat

Email: <sup>1</sup>[frdsnzl11@gmail.com](mailto:frdsnzl11@gmail.com), <sup>2</sup>[aslamiah@unlam.ac.id](mailto:aslamiah@unlam.ac.id), <sup>3</sup>[celia.cinantya@ulm.ac.id](mailto:celia.cinantya@ulm.ac.id)

---

### Article History:

Received: 15-11-2024

Revised: 25-11-2024

Accepted: 18-12-2024

### Keywords:

Accreditation, Facilities and infrastructure, Quality of education

**Abstract:** Education is an important element that aims to educate and develop individual potential. Through education, a person can build creativity, broaden their horizons, and develop a good personality. The quality of education in schools varies, which is largely influenced by the school's accreditation. Accreditation can be defined as formal recognition given by an authorized body to a school as an educational institution, indicating the suitability and quality of the school. High accreditation is usually associated with good quality education, reflects the quality of the institution and increases public trust in the school. However, in practice, accreditation is often viewed as a formal status without understanding its substantive meaning as a guarantee of educational quality. This research aims to analyze the relationship between school accreditation and the quality of education in SLB-C Negeri Pembina, South Kalimantan Province. Guaranteeing the quality of education through accreditation aims to ensure that students receive educational services and results that meet the promised standards. This research also aims to identify the extent to which accreditation at SLB reflects the actual quality of education, as well as its role in providing quality assurance to the community and education stakeholders.

---

## PENDAHULUAN

Akreditasi sering dianggap sebagai elemen paling penting yang harus dimiliki oleh sebuah sekolah karena dianggap sebagai indikator utama mutu pendidikan. Secara umum, masyarakat cenderung mengasosiasikan akreditasi tinggi dengan kualitas sekolah yang lebih baik tanpa memahami faktor-faktor yang memengaruhi proses akreditasi tersebut. Pengalaman serupa dialami oleh peneliti ketika berada di jenjang sekolah menengah pertama, di mana keluarga menyarankan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah dengan akreditasi tinggi, sementara peneliti memiliki pilihan lain. Situasi ini menunjukkan bagaimana akreditasi dapat memengaruhi citra dan reputasi sekolah, terutama dalam persepsi masyarakat terhadap nama dan kredibilitas institusi tersebut.

Menurut Sulaiman (2016), peningkatan mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh

implementasi sistem penjaminan mutu yang terintegrasi dengan proses akreditasi. Hal ini disebabkan oleh peran akreditasi sebagai alat ukur dan pengakuan formal terhadap kualitas suatu lembaga pendidikan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan penerapan akreditasi, lembaga pendidikan diharapkan mampu menciptakan budaya mutu yang berkesinambungan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tersebut. Menurut Adha et al. (2019), akreditasi berfungsi sebagai penjamin mutu pendidikan di sekolah, memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa sekolah telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa akreditasi mencerminkan tingkat kelayakan dan kualitas pelayanan pendidikan yang diterima siswa, yang berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Pendidikan.

Berangkat dari pengalaman peneliti, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi akreditasi, terutama bagaimana penilaian berbasis indikator tertentu dapat memberikan hasil akreditasi yang tinggi. Menurut Asmani (2011), asesor melakukan pengamatan dan penilaian sesuai dengan realitas tanpa adanya manipulasi, sehingga hasil akreditasi mencerminkan standar mutu yang sebenarnya. Akreditasi, dalam konteks ini, menjadi pengakuan bahwa sebuah institusi telah memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-program pendidikan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan proses akreditasi, diperlukan komunikasi yang efektif dan interaktif antara kepala sekolah dengan operator atau tim pelaksana akreditasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data administrasi sekolah disampaikan dengan benar dan akurat, sehingga terhindar dari miskomunikasi atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Dengan demikian, nilai akreditasi yang dihasilkan dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi dan menentukan kelayakan program-program serta proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah luar biasa ini.

Setelah hasil akreditasi diterbitkan, hal ini dapat mencerminkan kondisi dan kualitas pendidikan yang dimiliki oleh sekolah, atau yang dikenal sebagai mutu pendidikan. Menurut Priyanto (2021), mutu pendidikan adalah hasil layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar pengguna, tetapi juga mampu melampaui ekspektasi mereka. Dalam kaitannya dengan akreditasi, mutu pendidikan dikelola melalui sistem manajemen mutu yang bertujuan untuk mengorganisir data dan informasi penting sebagai dasar pengambilan keputusan untuk program-program sekolah.

Setelah hasil akreditasi diterbitkan, hasil tersebut mencerminkan kondisi serta kualitas pendidikan yang dimiliki oleh suatu sekolah, yang sering kali dikaitkan dengan mutu pendidikan. Dalam hal ini, mutu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak hanya memenuhi kebutuhan tetapi juga melampaui harapan pengguna layanan. Selain itu, mutu juga mencakup pengelolaan data secara sistematis untuk mendukung perbaikan dan pengambilan keputusan, termasuk dalam proses akreditasi sekolah.

Secara terminologi, konsep mutu memiliki berbagai interpretasi yang mengandung banyak perspektif dan kadang menimbulkan perbedaan pandangan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, mutu sering diterapkan melalui standar yang telah ditentukan, seperti kurikulum nasional yang mencakup tujuan pendidikan, standar kompetensi, standar isi, dan sistem penilaian, termasuk ujian nasional. Hal ini, sebagaimana dijelaskan oleh

Umaedi, Hadiyanto, dan Siswantari (2010), menunjukkan penerapan mutu relatif yang disesuaikan dengan kebijakan pendidikan nasional dan kebutuhan lokal.

Menurut Hadari Nawawi dalam Khadijah (2015), manajemen mutu terpadu adalah pendekatan manajemen fungsional yang berfokus pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh masyarakat yang dilayani. Hal ini berlaku baik dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik (*public service*) maupun dalam pembangunan masyarakat (*community development*). Pendekatan ini menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat melalui proses manajemen yang sistematis dan berorientasi pada hasil berkualitas tinggi.

Menurut Sunandar dalam Sholihin (2018), Tuntutan masyarakat terhadap sekolah terus meningkat, sehingga mutu pendidikan harus ditingkatkan dengan cepat dan bijaksana. Hal ini menuntut sekolah untuk senantiasa mengembangkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan agar mampu memenuhi harapan masyarakat. Selain manfaat signifikan yang diterima sekolah, hasil akreditasi juga memainkan peran penting sebagai penjamin kualitas institusi pendidikan. Ketiadaan akreditasi dapat menimbulkan dampak negatif yang berpotensi menghambat kelancaran pendidikan, khususnya di sekolah luar biasa, serta menimbulkan risiko yang tidak terduga di masa depan, yang pada akhirnya dapat mengganggu proses pembelajaran dan keberlanjutan operasional sekolah.

Menurut Suparno (2007), Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan institusi pendidikan yang dirancang untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran akibat kelainan fisik, emosional, mental, atau sosial. Namun, siswa-siswa ini tetap memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dapat dikembangkan. Ketidakterdaftar sekolah di Badan Akreditasi Nasional dapat menimbulkan dampak serius, termasuk penarikan izin operasional atau penyegelan sekolah yang dianggap ilegal atau "sekolah bodong." Kondisi ini merugikan pihak sekolah dan orang tua siswa, baik dari segi material maupun non-material, mengganggu hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Menurut Asopwan (2018), terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses akreditasi sekolah, seperti aspek konsep, instrumen, infrastruktur, administrasi, dan sumber daya manusia. Masalah-masalah tersebut biasanya muncul karena kurangnya persiapan yang dilakukan oleh sekolah. Untuk mencapai hasil akreditasi yang optimal, sekolah seharusnya mempersiapkan proses akreditasi secara matang dan serius, menghindari sikap meremehkan pentingnya akreditasi. Persiapan yang baik dapat membantu sekolah memenuhi standar yang ditetapkan dan memastikan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa.

Sekolah luar biasa memiliki peran penting sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang memerlukan fasilitas dan layanan yang memadai. Namun, tidak semua daerah, terutama kota kecil, memiliki akses ke sekolah luar biasa ini. Kalaupun ada, banyak tantangan dalam menyekolahkan anak-anak berkebutuhan khusus, terutama jika sekolah tersebut belum memiliki akreditasi yang baik. Selain itu, fasilitas dan media pendukung di sekolah luar biasa sering kali membutuhkan perhatian lebih besar dibandingkan dengan sekolah biasa, mengingat kebutuhan khusus siswa yang harus dipenuhi secara optimal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama, akreditasi bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kinerja pendidikan dengan mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Akreditasi menjadi alat ukur kelayakan penyelenggaraan pendidikan, mencakup berbagai indikator seperti kualitas layanan, capaian pembelajaran, dan manajemen berbasis data yang mencerminkan kondisi faktual sekolah. Menurut Malik (2014), pembangunan sektor pendidikan harus berfokus pada pemberdayaan lembaga pendidikan, dengan sekolah sebagai pusat pembentukan nilai-nilai yang mendukung mutu pendidikan. Dalam mekanisme akreditasi, proses ini memastikan data yang disampaikan sesuai dengan kenyataan di lapangan, guna mencegah kesalahan dalam menentukan akreditasi. Persiapan administrasi yang matang sangat diperlukan agar akreditasi berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang optimal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber di lingkungan sekolah. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data langsung di lapangan untuk memahami konteks alami tanpa adanya intervensi dari peneliti. Sugiyono (2011, hlm. 14) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena dilakukan dalam situasi yang alami (*natural setting*). Instrumen penelitian yang digunakan meliputi lembar wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Lembar observasi dirancang untuk mempelajari standar sarana prasarana sekolah yang menjadi salah satu fokus utama akreditasi. Dokumentasi mencakup data-data yang relevan seperti catatan administratif, laporan kegiatan, dan foto-foto pendukung. Wawancara digunakan sebagai metode utama, di mana peneliti melakukan percakapan langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi secara lisan. Metode ini bertujuan memperoleh data yang mampu menjelaskan masalah penelitian secara mendalam dan menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan para tenaga pendidik di sekolah luar biasa sebagai subjek penelitian untuk mengkaji standar isi dan proses pendidikan terkait akreditasi yang dimiliki sekolah. standar sarana dan prasarana memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil akreditasi yang dicapai oleh sekolah. Berikut adalah tabel yang memuat data mengenai standar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah luar biasa ini, yang dihasilkan dari analisis data penelitian.

**Tabel 1 Data PTK dan PDI**

No	Jenis Sarpras	Jumlah (T.A 2023/2024)
1	Ruang Kelas	55
2	Ruang Perpustakaan	1
3	Ruang Laboratorium	1
4	Ruang Praktik	1

5	Ruang Pimpinan	1
6	Ruang Guru	1
7	Ruang/Tempat Ibadah	1
8	Ruang UKS	1
9	Ruang Toilet	19
10	Ruang Gudang	2
11	Ruang Sirkulasi	0
12	Ruang/Taman Bermain	1
13	Ruang TU	1
14	Ruang Konseling	1
15	Ruang Osis	0
16	Ruang Bangunan	24
17	Ruang Vokasional	6
18	Ruang Asesmen	1
19	Ruang Bina Diri	1
20	Ruang Olahraga (tertutup)	1
21	Ruang Braille	1
22	Kantin Sekolah	2
Total		122



**Gambar 1 Ruang Kelas**



**Gamabar 2 Aula Sekolah**



**Gambar 3 Ruang Kantin**



**Gambar 4 Ruang Ibadah**

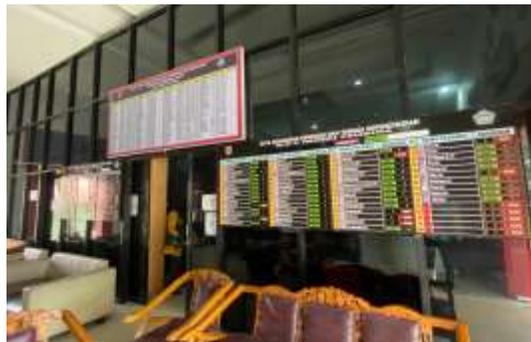


**Gambar 5 Ruang Bina Diri    Gambar 6 Ruang Vokasional    Gambar 7 Ruang Guru**

Tabel 1 mencantumkan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh sekolah luar biasa untuk mendukung kegiatan pembelajaran siswa berkebutuhan khusus. Fasilitas-fasilitas yang tersedia telah disesuaikan dengan standar akreditasi, di mana sekolah ini memiliki jumlah ruang yang memadai untuk menunjang proses pendidikan.

**Tabel 2 Data PTK dan PDI**

Uraian	Guru PNS	Tendik PNS	Guru PPPK	GTT	Tendik (Honorar)	OB dan Tukang Kebun	Satpam	Sopir	Peserta Didik
Laki-laki	25	2	1	8	15	5	3	1	148
Perempuan	21	3	3	10	3	3	1	0	85
Total	46	5	4	18	18	8	4	1	233



**Gambar 7 Data Pegawai**

Tabel 2 mencantumkan jumlah pegawai di SLB – C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan, mencakup guru laki-laki sebanyak ..... orang dan guru perempuan sebanyak ..... orang. Jumlah ini dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran di setiap rombongan belajar (rombel). Dengan rasio guru yang memadai, setiap rombel dapat diajar oleh 2 hingga 3 guru, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan efektif, sesuai kebutuhan siswa berkebutuhan khusus di sekolah ini. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga pengajar di sekolah telah mendukung tercapainya kualitas pendidikan yang optimal.

**Tabel 3 Data Sanitasi**

No	Variabel	Uraian
1	Sumber air	Ledeng/PAM
2	Sumber air minum	Ledeng/PAM
3	Air bersih	Cukup sepanjang waktu
4	Toilet	Ada
5	Tipe toilet	Toilet duduk/jongkok
6	Kegiatan cuci tangan	Setiap hari
7	Jumlah tempat cuci tangan	26
8	Jumlah tempat cuci tangan yang rusak	0
9	Sabun di setiap tempat cuci	Ada
10	Pembuangan air limbah	Saluran pembuangan ke sepiteng/IPAL
11	Pembersihan limbah	Ya
12	Sumber listrik	PLN
13	Daya listrik	66000 Watt



**Gambar 8 Tempat Cuci Tangan**



**Gambar 9 Tempat Cuci Tangan**



**Gambar 10 Toilet & Cuci Tangan**

Tabel 3 mencantumkan fasilitas sanitasi yang tersedia di SLB-C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan berperan penting dalam mendukung kebutuhan siswa, khususnya dalam menjaga kesehatan. Fasilitas ini tidak hanya mendukung kegiatan pembelajaran tetapi juga memberikan manfaat di luar aspek akademik dengan membantu siswa menjaga kebersihan dan kesehatan mereka. Ketersediaan sanitasi yang baik menunjukkan perhatian sekolah terhadap lingkungan yang higienis, yang sangat penting untuk menunjang kesejahteraan siswa berkebutuhan khusus. Berdasarkan ketentuan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan, kriteria dan perangkat akreditasi sekolah dirancang untuk mengevaluasi kinerja institusi pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Penilaian ini mencakup kelayakan sarana dan prasarana, kompetensi tenaga pendidik, dan efektivitas proses pembelajaran. Salah satu tujuan dari akreditasi adalah memberikan penilaian terhadap satuan pendidikan SLB, termasuk SLB-C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan, untuk memastikan kelayakan penyelenggaraan pendidikan berkebutuhan khusus. Dalam akreditasi sebelumnya, perangkat penilaian untuk jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB masih dipisahkan. Namun, proses konversi dilakukan untuk menentukan status akreditasi berdasarkan hasil evaluasi setiap jenjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil akreditasi dengan menyoroti standar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SLB-C Negeri Pembina. Fasilitas yang memadai dianggap penting untuk mendukung kenyamanan siswa dalam belajar dan memberikan semangat kepada guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran secara optimal.

## **KESIMPULAN**

SLB-C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan telah membuktikan bahwa akreditasi memiliki hubungan yang erat dengan mutu pendidikan yang diselenggarakan. Dengan keberhasilan meraih akreditasi A, sekolah ini menunjukkan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana, didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten dan fasilitas yang memadai, menjadi faktor penting dalam menciptakan mutu pendidikan yang berkualitas. Akreditasi tidak hanya menjadi pengakuan formal atas kualitas sekolah, tetapi juga menjadi dasar untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang diberikan.

Pencapaian akreditasi ini memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatnya jumlah siswa setiap tahunnya, dukungan finansial berupa dana BOS, dan prioritas alokasi tenaga kerja yang mendukung kebutuhan sekolah. Selain itu, luas lahan yang tersedia membuka peluang untuk pengembangan fasilitas tambahan, yang berperan penting dalam menunjang kegiatan belajar-mengajar siswa berkebutuhan khusus. Hal ini menegaskan bahwa akreditasi tidak hanya mencerminkan kualitas pendidikan saat ini tetapi juga menjadi landasan bagi pengembangan sekolah di masa depan, sehingga mutu pendidikan terus terjaga dan meningkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Adha, M. A., Benyamin, C., Octaviarnis, I., & Thalib, D. (2019). Peran Akreditasi dalam Penjaminan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. *Media Manajemen Pendidikan*, 2(2), 270–278. <https://doi.org/10.30738/mmp.v2i2.5780>

- [2] Asmani (2011). Pentingnya Akreditasi Rs Sebagai Jaminan Mutu Pelayanan Dan Keselamatan Di Rs.
- [3] Asopwan, D. (2018). Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas.
- [4] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Keputusan Menteri Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama. Jakarta: Kemdikbudristek.
- [5] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta: Kemdikbudristek.
- [6] Khadijah, I. (2015). Manajemen Mutu Terpadu (TQM) pada Lembaga Pendidikan Islam. Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam, 61
- [7] Malik A. (2014). Fungsi Komunikasi Antara Guru dan Siswa dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan (Studi Kasus Proses Belajar Mengajar pada SMP Negeri 3 Sindue). Jurnal Interaksi, 3(2), 168–173
- [8] Sulaiman, A., & Wibowo, U. B. (2016). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 4(1). <https://doi.org/10.21831/amp.v4i1.8197>
- [9] Suparno. (2007). Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, Jakarta : Dirjen Depdiknas, 97
- [10] Sholihin E. N. C., Bafadal, I., & Sunandar, A. (2018).Pengelolaan Persiapan Akreditasi Sekolah. Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan.
- [11] Umaedi, Hadiyanto, & Siswantari. (2007). Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Universitas Terbuka.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN